

PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Gusni Vitri, Hazmal Herman

Program Studi Teknik Sipil Universitas Dharma Andalas
Jl. Sawahan No. 103 A Simpang Haru Kota Padang - 25123

Email: vitri.gusni@gmail.com

Dikirim :10 April 2018

Direvisi: 15 Juni 2018

Diterima :18 Juli 2018

ABSTRAK

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Salah satu strategi percepatan pembangunan untuk mengatasi kendala luasnya wilayah Indonesia adalah melalui pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui program pemberdayaan. Di Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan beberapa program pemberdayaan masyarakat yaitu Program Dana Desa, Program Kotaku, Program Pamsimas, Program Sanimas dan Pisew. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metoda deskriptif untuk mengetahui jenis infrastruktur yang di bangun, tahapan pelaksanaan dan kendala-kendala yang di hadapi dalam program pemberdayaan. Pengambilan data di lakukan dengan wawancara, FGD, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Opsi pemilihan jenis infrastruktur yang dapat di bangun oleh masyarakat, lebih banyak pada program dana desa dan pisew, dan paling sedikit pada program pamsimas dan sanimas. Jenis infrastruktur yang paling banyak di bangun melalui pemberdayaan adalah jalan, sarana air minum dan sanitasi. Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di mulai dari tahapan persiapan (penentuan lokasi, sosialisasi, rekrutmen pendamping program, pembentukan LKM dan KSM), tahap perencanaan (penyusunan dokumen RKM/proposal), tahap pelaksanaan pembangunan (pengadaan barang/jasa, perubahan dan serah terima), tahap pasca konstruksi (operasional dan pemeliharaan). Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program, antara lain : permasalahan tingkat masyarakat, permasalahan konsultan/fasilitator pendamping, permasalahan administrasi, permasalahan pelaksanaan pembangunan (waktu, mutu, biaya).

Kata kunci: Infrastruktur masyarakat, Program pemberdayaan, Dana Desa, Kotaku, Pamsimas, Sanimas, Pisew.

1. PENDAHULUAN

Salah satu indikator yang di jadikan tolak ukur keberhasilan suatu Negara adalah pembangunan infrastruktur. Menurut *American Public Works Association* (Stone, 1974 Dalam Kodoatie,R.J.,2005), Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Secara teknik, infrastruktur memiliki arti dan definisi sendiri yaitu merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Pengelompokan sistem infrastruktur dapat dibedakan menjadi (Grigg, 2000 dalam Kodoatie,R.J.,2005) : grup keairan, grup distribusi dan produksi energi, grup komunikasi, grup transportasi (jalan, rel), grup bangunan, grup pelayanan transportasi (stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, dll), grup pengelolaan limbah.

Kendala-kendala dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia antara lain adalah wilayah yang sangat luas. Oleh karena itu di perlukan sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi pada akhirnya menjadi pilihan untuk mendekatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan sebuah pembangunan (Sururi, 2015). Di Indonesia, keberadaan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah sebagai payung hukum merupakan sumber sentralisasi kebijakan pembangunan maka dengan datangnya reformasi pemerintahan yang melahirkan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999, dan direvisi melalui UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih membuka peluang partisipasi masyarakat dan upaya pemberdayaan pembangunan berbasis masyarakat

dalam rangka merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Pembangunan berbasis masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat. Program-program yang sedang di lakukan di Indonesia saat ini adalah Program Dana Desa, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan program-program lainnya. Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang mendapatkan alokasi untuk program-program tersebut. Untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016, mendapatkan alokasi Program Dana Desa sebesar 740 Miliar. Sementara itu, alokasi dana Program Sanimas untuk tahun 2017 pada sepuluh Kabupaten Kota Se-Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 23,3 milyar. Untuk Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), alokasi dana untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sebesar Rp. 22,650 miliar. Dengan besarnya dana yang di anggarkan untuk program pembangunan infrastruktur secara pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, maka partisipasi masyarakat dalam sangat di perlukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis infrastruktur yang di bangun oleh masyarakat, tahapan pelaksanaan beserta kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur program-program pemberdayaan di provinsi Sumatera Barat.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pambangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*, dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : Pertama, ENABLING yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, EMPOWERING yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai *input* dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, PROTECTING yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya moderen seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan (Munawar, 2011).

Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin (Deliveri, 2004). Tim pendamping ini merupakan salah satu *external factor* dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat (PM) akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim PM sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Waktu pemunduran tim PM tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program antara tim PM dan warga masyarakat. Berdasar beberapa pengalaman dilaporkan bahwa pemunduran Tim PM dapat dilakukan minimal 3 (tiga) tahun setelah proses dimulai dengan tahap sosialisasi. Walaupun tim sudah mundur, anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai penasehat atau konsultan bila diperlukan oleh masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat infrastruktur yang sedang berjalan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM Mandiri Perdesaan, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa, antara lain:

- 1) UU 6/2014 tentang Desa
- 2) PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
- 3) PP 8/2016 ttg Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikan ke pada tiap desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

2. Program Kota Tanpa Kumuh

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Program ini sebelumnya bernama PNPM Mandiri Perkotaan dan di harapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

3. Program Pamsimas

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai 100% akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan pada tahun 2019 atau disebut juga dengan *Universal Access 2019*. Pendekatan Berbasis Masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengoperasian dan pemeliharaan. Proses tersebut mengajak masyarakat untuk menemu-kenali berbagai permasalahan terkait dengan air minum dan sanitasi, kemudian dibimbing untuk melakukan berbagai langkah solusi dan pencegahannya termasuk membangun sarana yang dibutuhkan seperti sarana air minum dan sanitasi serta membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Kegiatan Program Pamsimas mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal; peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; serta pengembangan kapasitas pelaku Pamsimas melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Secara nasional Program Pamsimas menerapkan pendekatan berbasis tugas pokok dan fungsi kementerian dan lembaga, antara lain yang terkait dengan pengelolaan air minum, sanitasi, pemberdayaan masyarakat, desa, perencanaan dan penguatan kelembagaan. Oleh sebab itu di tingkat nasional program Pamsimas dikelola oleh lintas kementerian yaitu Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat. Sedangkan di tingkat desa/kelurahan program ini menganut pendekatan berbasis masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaku utama pembangun.

Ketikkan teks Anda

4. Program Sanimas

Sanimas merupakan singkatan dari program Sanitasi Berbasis Masyarakat. Program ini merupakan program peningkatan kualitas lingkungan di bidang sanitasi khususnya pengelolaan air limbah yang diperuntukkan bagi kawasan padat kumuh miskin (PAKUMIS) perkotaan dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat. SANIMAS atau Sanitasi Berbasis Masyarakat adalah program bukan proyek, Pedoman sanitasi berbasis masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan atau kelompok masyarakat, LSM./swasta dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan sanitasi berbasis masyarakat.

5. Program PISEW

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan, salah satunya adalah *Program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi* yang lebih dikenal dengan nama PISEW. Program ini sudah dimulai sejak 2007 dengan nama Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dan pada tahun 2015 mengalami pembaharuan dengan nama PISEW.

Program ini diharapkan bisa menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desanya. Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur sosial dan ekonomi perdesaan, dengan berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Akses disini adalah kemudahan untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan kelengkapan data yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan bacaan seperti : surat kabar, jurnal, makalah, dokumen pemerintah, data yang tersimpan di website dan laporan-laporan yang berkaitan dengan topik pokok tentang program pemberdayaan di Provinsi Sumatera Barat. Studi Dokumentasi juga dilakukan untuk meninjau pengalaman dari penelitian sebelumnya. Hasil studi dokumentasi di jadikan acuan untuk penyusunan daftar pertanyaan wawancara.

2) Wawancara Terbuka dan Focus Group Discussion (FGD)

Wawancara terbuka dilakukan kepada :

- Dinas pemberdayaan masyarakat, pejabat satuan kerja program Dana Desa, Pamsimas, Kotaku, Sanimas, Pisew. Pelaksanaan wawancara di kantor dinas/satuan kerja di Kota Padang.
- Konsultan atau fasilitator pendamping lapangan program. Wawancara dilakukan di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Payakumbuh.
- Lembaga Masyarakat yang dibentuk masing-masing program dan masyarakat penerima manfaat hasil pembangunan infrastruktur. Tempat pelaksanaan wawancara sejalan dengan lokasi observasi lapangan, yaitu : Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar.

Penggunaan metoda wawancara dan FGD disesuaikan dengan jumlah responden yang hadir, pada umumnya untuk tingkat lembaga masyarakat dan masyarakat penerima manfaat dilakukan FGD.

3) Observasi

Observasi lapangan dilakukan untuk melihat contoh hasil pembangunan infrastruktur pada masing-masing lapangan.

4. HASIL DAN DISKUSI

Jenis Infrastruktur Yang Di Bangun Pada Program Pemberdayaan Masyarakat

Kategori sarana prasarana yang dibangun pada program Dana Desa adalah :

- 1) Sarana prasarana dasar, yaitu Transportasi dan lingkungan perumahan.
- 2) Sarana prasarana pelayanan sosial dasar yaitu prasarana kesehatan dan pendidikan.
- 3) Sarana prasarana ekonomi pertanian.
- 4) Sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan dan penanganan bencana, serta pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Dari keseluruhan sarana prasarana di atas, infrastruktur nagari yang paling banyak di bangunan adalah parasarana Transportasi berupa Jalan.

Kegiatan Infrastruktur yang di bangun pada Program Kotaku sebagai berikut :

- 1) Prasarana Air Minum
 - a. Sumur Bor Dalam
 - b. Hidrant Umum
 - c. Katub (valve)
 - d. Perpipa-an Transmisi dan Distribusi
 - e. Reservoir
- 2) Sarana dan Prasarana Persampahan
Berupa wadah / tong sampah individual (tanggung jawab masing-masing rumah tangga), gerobak sampah, motor sampah, transfer depo container untuk Arm Roll Truck dan kontainer komunal.
- 3) Sanitasi
Perpipaan Air Limbah, Instalasi Pengelolaan air limbah (IPAL), Tangki Septik untuk MCK
- 4) Drainase
 - Saluran Drainase
 - Sumur Resapan Air Hujan
- 5) Jalan
Jalan Aspal , Jalan Beton, Jalan Paving Block
- 6) Jembatan
- 7) Penerangan Jalan Umum
Pada program ini, infrastruktur yang banyak di bangun adalah jalan lingkungan dan saluran drainase.

Pada Program Pamsimas, infrastruktur yang di bangun adalah sebagai berikut :

(1) Jenis kegiatan Pembangunan Air Minum

Opsi kegiatan pembangunan sarana air minum baru dilakukan setelah keadaan sarana air minum yang ada saat ini diketahui, masyarakat dengan pendampingan dari Tim Fasilitator Masyarakat memilih jenis sarana air minum yang ingin dibangun dan hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan konstruksinya. Pemilihan opsi sarana air minum menggunakan pilihan sebagai berikut :

a. Perpipa-an

Dengan bangunan Penangkap Mata Air (PMA), Saringan pasir lambat,, Sumur Bor dan pompa dengan pipa distribusi , Pompa, motor diesel, perpipa-an, reservoir, kran umum, hidran umum

b. Non Perpipa-an

Sumur Gali, Sumur Pompa tangan, penampung air hujan,

(2) Jenis Kegiatan mendukung PHBS

Opsi kegiatan pembangunan sarana sanitasi sekolah masyarakat dengan pendampingan Tim Fasilitator Masyarakat dan Sanitarian melakukan pemilihan opsi sarana sanitasi dengan membangun Jamban sekolah, tempat cuci tangan. Pemilihan opsi sarana sanitasi tersebut harus mempertimbangkan juga antara lain: biaya konstruksi, ketersediaan lahan untuk konstruksi, serta biaya operasional dan pemeliharaan. Sarana sanitasi ini hanya dapat dibangun pada sekolah dasar/ sederajat yang berada di wilayah desa/ kelurahan setempat.

Di Provinsi Sumatera Barat, opsi yang di pakai paling banyak adalah pembangunan sarana air minum perpipa-an.

Adapun Prasarana dan Sarana Program SANIMAS adalah:

1) IPAL Komunal dengan Perpipa-an

IPAL Komunal dengan sistem perpipa-an sesuai dengan permukiman yang masyarakatnya memiliki jamban di masing-masing rumah melayani minimal 50 KK. IPAL Komunal mengolah air limbah dari rumah-rumah melalui jaringan perpipa-an. Pipa yang dipergunakan adalah pipa jenis air limbah berbahan PVC SNI dengan diameter 4 – 6 inci atau dalam keadaan khusus dapat menggunakan PVC SNI tipe AW kecuali untuk sambungan rumah boleh menggunakan tipe D (ditanam sesuai dengan peraturan dari SNI yang berlaku) dan dilengkapi dengan bangunan pelengkap (bak kontrol, bak perangkap minyak, dan manhole) di setiap ujung gang, belokan dan persimpangan. Untuk kondisi tertentu pipa yang terekspos harus menggunakan pipa jenis carbon steel sebagai chasing. Setiap Sambungan Rumah (SR) dilengkapi dengan perangkap lemak dan bak kontrol. Bangunan IPAL terdiri dari: Komponen instalasi pengolahan air limbah terdiri dari : - Inlet - Bak Pengolahan (banyak pilihan teknologi) - Outlet

- 2) Kombinasi MCK dan Sistem Perpipaan Kombinasi MCK dan Sistem Perpipaan adalah bangunan yang melayani rumah yang memiliki jamban dan yang tidak memiliki jamban pribadi. Kriteria untuk MCK: 1. Di bangun di tempat-tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial atau dibangun di wilayah pemukiman warga yang melayani minimal 50 KK. 2. Mempunyai bangunan: - 2 ruang untuk mandi dan kakus wanita; - 1 ruang untuk mandi dan kakus pria; - 1 ruang cuci dengan 4 kran; - 1 ruang untuk 2 urinoar. Kriteria untuk perpipaan: 1. Sistem ini untuk melayani minimal 25 SR. 2. Sistem ini tergantung pada topografi dan kemiringan lahan. 3. Sistem ini memungkinkan pengguna dari MCK untuk berpindah ke jamban pribadi dan selanjutnya menyambungkannya ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal (IPAL). IPAL dan MCK komunal adalah pilihan masyarakat sebagai sarana yang di bangun.

Prasarana yang di bangun melalui program PISEW :

- 1) Infrastruktur Transportasi
 - a. Infrastruktur jalan dan jembatan
 - b. Infrastruktur Tambatan perahu
- 2) Infrastruktur Air Minimum dan Sanitasi
- 3) Infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri
Seperti : Irigasi
- 4) Infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran, pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pendukung kegiatan pariwisata.
 - a. Bangunan Pasar
 - b. Gudang dan lantai jemur
 - c. Jalan usaha tani
 - d. Sanitasi dan kandang kolektif
 - e. Infrastruktur kegiatan pariwisata

Dari seluruh pilihan infrastruktur di atas, infrastruktur yang di bangun pada umumnya adalah jalan dan irigasi.

Dari keseluruhan program diatas, opsi pemilihan jenis infrastruktur yang dapat di pilih untuk di bangun sebagai berikut :

Tabel 1. Pengelompokan opsi pemilihan jenis infrastruktur

Kegiatan Infrastruktur	Dana Desa	Kotaku	Pamsimas	Sanimas	Pisew
Grup Transportasi	√	√			√
Grup Keairan	√	√	√	√	√
Grup Distribusi dan produksi energi	√				√
Grup Komunikasi	√				√
Grup Bangunan	√	√			√
Grup Pengelolaan Limbah	√	√	√	√	√
Grup Pelayanan Transportasi (stasiun, pelabuhan, dll)	√				√

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur oleh Masyarakat

Tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1) Tahap Persiapan

Adapun kegiatan yang di laksanakan pada tahap ini antara lain :

a. Penjaringan Minat

- Sosialisasi Tingkat Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan ini di laksanakan 1 (satu) tahun Sebelum Wali Nagari akan di undang mengikuti sosialisasi dan akan di diikuti dengan pernyataan minat dari Nagari yang bersangkutan untuk menerima program dengan mengirimkan surat permohonan.
- Seleksi Kabupaten/Kota
Tahapan dilakukan dengan mengevaluasi proposal minat yang sudah di ajukan oleh masing-masing nagari untuk program pamsimas, dan sanimas. Namun untuk program dana desa, semua nagari akan selalu mendapatkan alokasi dana tergantung dari luas daerah, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan. Untuk program Kotaku dan Pisew, seleksi berdasarkan daerah prioritas yang sudah disepakati berdasarkan data yang sudah ada.

- b. Penyiapan Fasilitator dari Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan
 - Kriteria Calon Konsultan dan Fasilitator
Kriteria Konsultan dan Fasilitator masing-masing program berbeda, namun untuk saat ini pendidikan minimal konsultan dan fasilitator adalah sarjana (S1). Untuk program Dana Desa, Pamsimas dan Kotaku, akan di dampingi oleh Konsultan dari tingkat pusat, sedangkan untuk program animas dan pamsimas sampai level provinsi.
 - Pelatihan dan Bimbingan Teknis Konsultan/Fasilitator Pendamping
Sebelum di tempatkan di lapangan, Tim Konsultan dan Fasilitator akan mendapatkan pelatihan dasar. Bimbingan lanjutan pun akan di lakukan secara berkala.
 - Penandatanganan Kontrak Kerja Konsultan/Fasilitator Pendamping
Kontrak kerja konsultan dan fasilitator di buat per tahun dan akan di perpanjang sesuai dengan hasil penilaian kinerja. Khusus untuk program Pisew, pendampingan fasilitator hanya 6 (enam) bulan. Untuk tahun berikutnya, dilaku kan rekrut men baru.
- c. Tahapan penyiapan warga di desa/kelurahan terpilih
Penyipan masyarakat di lokasi terpilih dilakukan untuk mencari kader-kader atau relawan yang akan berpartisipasi dalam tahapan pelaksanaan program. Lama waktu kegiatan masing-masing program berbeda tergantung pedoman pelaksanaan.
- d. Sosialisasi di tingkat nagari/kelurahan
Sosialisasi di lakukan di mulai dari tingkat nagari/kelurahan sampai pada tingkatan yang lebih rendah seperti RW, RT, Kelompok masyarakat tertentu seperti karang taruna, lansia.
- e. Penentuan titik lokasi
Penentuan titik lokasi kegiatan tergantung dari skala prioritas yang sudah di susun bersama masyarakat, fasilitator pendamping dan aparat nagari setempat.
- f. Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
LKM adalah organisasi yang didirikan masyarakat secara independen sebagai wadah untuk memfasilitasi kegiatan program. KSM adalah kelompok yang di bentuk sebagai panitia pelaksana kegiatan infrastruktur. KSM akan mengorganisir kegiatan dari awal sampai selesai. Untuk lokasi baru, di awali dengan pembentukan LKM, setelah itu di bentuk KSM. Pada program Sanimas dan Pisew, yang di bentuk hanya KSM saja.
- g. Pembentukan tim pengadaan barang dan jasa
Tim ini adalah bagian dari KSM. Tim ini akan di bentuk jika 1 (satu) atau lebih material yang di adakan bernilai lebih dari Rp. 50 juta. Untuk material yang bernilai di bawah nilai tersebut akan langsung di beli oleh KSM. Pengadaan barang atau jasa di lakukan dengan pelelangan sederhana dengan mengundang sekurangnya 3 (tiga) toko pemasok dan akan di pilih harga terendah.
- h. Pembentukan kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP)
Kelompok ini pada melaksanakan operasional dan pemeliharaan pasca konstruksi. Pada masing-masing program, penamaan kelompok ini berbeda seperti pada program pamsimas dinamakan Badan pengelola Sarana Prasarana Air Minum (BPSPAM).

2) Tahap Perencanaan

- a. Penyusunan/Review RPJM Nagari/Kelurahan
Seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari/Kelurahan (RPJM Nag/Kel) yang di pecah menjadi rencana tahunan. Kegiatan ini adalah hasil musyawarah pengembangan (musrenbang) yang sudah di susun dengan melibatkan seluruh stakeholders di nagari/kelurahan.
- b. Pilihan Prasarana dan Sarana yang akan di bangun
Prasarana dan Sarana yang di bangun di sesuaikan dengan RPJM, kebutuhan masyarakat dan ketersediaan lahan. Untuk memilih akan di lakukan musyawarah untuk pemilihan skala prioritas.
- c. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)/proposal Kegiatan
 - Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RKM
Penyiapan dokumen ini akan melibatkan KSM, Konsultan/Fasilitator pendamping, masyarakat penerima manfaat dan aparat pemerintahan setempat.
 - Tahapan Penyusunan Dokumen RKM
Penyusunan di mulai dengan penyiapan/pembebasan lahan, pembuatan gambar rencana, perhitungan biaya, jadwal pelaksanaan kegiatan. Pertemuan-pertemuan untuk menyusun dokumen teknis ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. KSM adalah kumpulan beberapa orang yang pada umumnya tidak mempunyai pengetahuan tentang teknis infrastruktur. Peran

Fasilitator Teknik dalam mendampingi proses ini sangat penting. Keterampilan dan pengetahuan Fasilitator Teknik berpengaruh pada dokumen yang di hasilkan.

3) Tahap Pelaksanaan

- a. Tahap Persiapan Konstruksi
- b. Pelaksanaan Konstruksi
 - Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan barang dan jasa akan dilakukan oleh KSM dan Tim pengadaan. Tenaga Kerja yang di pakai diutamakan dari nagari/kelurahan setempat.
 - Etika Pelaksanaan Pekerjaan
Kegiatan dilaksanakan dengan memakai prinsip transparansi dan akuntabilitas. KSM akan mempertanggung jawabkan penggunaan dana pada masyarakat melalui papan informasi maupun pada acara musyawarah pelaksanaan pekerjaan.
- c. Adendum Kontrak / Perubahan Kegiatan
Adendum akan di laksanakan jika terjadi perubahan pada dokumen RKM/Proposal yang telah di susun. Perubahan dilakukan setelah musyawarah dan di setuju semua pihak. Adendum Kontrak atau berita acara perubahan akan di tandatangi oleh KSM, LKM, Fasilitator, Aparat pemerintahan dan perwakilan masyarakat. Format akan mengacu kepada pedoman administrasi masing-masing program.
- d. Uji Coba Pemakaian Sarana Prasaranan
Sarana dan Prasarana yang telah selesai di bangun, akan di uji dulu sebelum dilakukan serah terima pekerjaan.
- e. Pelaksanaan Serah Terima
 - Serah Terima Pekerjaan
Serah Terima pekerjaan di lakukan oleh KSM ke LKM dan Pemerintahan Nagari/Kelurahan. Untuk program Pisew, serah terima dilakukan kepada Satuan Kerja (Satker) pendamping Program.
 - Serah terima Sarana (Aset)
Serah terima aset dilakukan kepada pemerintahan nagari/Kelurahan dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

4) Tahap Pasca Konstruksi

- a. Tahap Operasional dan Pemeliharaan (OP)
 - Pengelolaan
Kelompok pemanfaat dan pemelihara akan mengelola sarana prasaran yang telah di bangun.
 - Penyuluhan
Penyuluhan dilakukan pada program Pamsimas dan Sanimas.
 - *Standard Operating Procedure* (SOP)
Pada beberapa program sudah memiliki buku pedoman/SOP pemeliharaan. KPP akan melakukan kegiatannya sesuai dengan SOP tersebut.
- b. Pendanaan Operasi Dan Pemeliharaan
Pendanaan untuk operasional dan pemeliharaan adalah hasil dari iuran warga dan anggaran dari APBNag/Kel.

Ada beberapa perbedaan dalam tahapan proses, sesuai dengan karakteristik di antara program-program ini :

- Untuk program Dana Desa, program ini adalah program rutin pemerintah setiap tahun. Setiap Nagari memperoleh dana anggaran rutin tahunan tergantung dari luas wilayah dan jumlah penduduk. Pendampingan dilakukan secara rutin setiap tahun.
- Program Pamsimas dilaksanakan untuk nagari atau kelurahan terpilih yang mengalami kesulitan dalam penyediaan air minum. Pendampingan rutin hanya di lakukan sampai infrastruktur Air Minum dan Sanitasi beroperasi. Pada tahun berikutnya, konsultan/fasilitator akan mendampingi nagari / kelurahan yang baru. Wilayah lama akan di monitoring secara periodik dan akan ada pertemuan asosiasi BPSAM tingkat Kabupaten/Kota.
- Pada program KOTAKU, pendampingan dilakukan secara rutin setiap tahun. Namun tidak semua lokasi dampingan mendapatkan alokasi dana pembangunan infrastruktur setiap tahun.
- Ada persamaan karakteristik pada program Sanimas dan Pisew, program ini hanya di lakukan dalam 1 (satu) siklus. Pendampingan di lakukan sampai tahap pelaksanaan konstruksi. Kontrak kerja fasilitator pendamping pun singkat. Untuk program tahun berikutnya, siklus akan di mulai

lagi sejak rekrutmen awal fasilitator. Sedangkan untuk program dana desa, pamsimas dan kotaku, rekrutmen fasilitator hanya untuk penggantian jika ada fasilitator yang mengundurkan diri.

Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pemberdayaan Masyarakat

Dari keseluruhan tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di temukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan ditingkat masyarakat
Diantaranya kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, keterbatasan sumber daya manusia, adanya konflik internal dan eksternal.
Sejalan dengan hal di atas, penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa program alokasi dana desa di desa buntongi kecamatan ampana kota (Hardianti S dkk, 2017) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan masih sangat rendah atau kurang maksimal, terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa. Masih kurang aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah disebabkan karena masih kurang pemahamannya masyarakat desa akan pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung program pembangunan tersebut. Sedangkan aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi yang ditinjau dari, pekerjaan serta penghasilan/pendapatan berhubungan erat dengan partisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan sedangkan pendidikan berhubungan dengan partisipasi pada tahap perencanaan serta monitoring dan evaluasi.
- 2) Permasalahan Konsultan dan Fasilitator Pendamping
Sistem kontrak kerja fasilitator paling lama 1 (satu) tahun, menyebabkan tingkat mobilisasi atau pergantian fasilitator cukup tinggi. Hal ini menimbulkan efek psikologis ketidakpastian atau hanya sebagai pekerjaan 'sementara' untuk Konsultan/fasilitator pendamping. Efek lain dari hal ini adalah Konsultan/fasilitator kurang memahami program.
- 3) Permasalahan Administrasi
Aturan-aturan program dan dokumen administrasi yang harus disiapkan oleh masyarakat cukup banyak, kadang kala ini menyebabkan keterlambatan pencairan dana. Selain itu RPJM Nagari/kelurahan tidak tersusun jelas karena pengetahuan aparat desa belum paham dalam penyusunannya. Sinergi antar berbagai program di Nagari/Kelurahan belum terjalin dengan baik.
- 4) Permasalah waktu, mutu dan dana
Pelaksana kegiatan adalah masyarakat yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan teknis, pendampingan fasilitator belum memadai. Di butuhkan waktu yang cukup lama untuk alih keterampilan dan keahlian. Selain tenaga Kerja yang di gunakan bukan tenaga kerja terampil, di tambah dengan waktu pencairan dana tidak pasti.
Penelitian Chasanah U (2013), Komparasi Proyek Konstruksi Kontraktual dengan proyek Konstruksi Berbasis Pemberdayaan menemukan bahwa pelaksanaan proyek konstruksi lebih baik dilakukan dengan cara kontraktual. Walaupun antara kontraktual dan pemberdayaan masyarakat sama – sama melakukan kontrak, namun kontraktual lebih adanya tanggung jawab yang jelas dan berbadan hukum. Perbandingan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria, sub kriteria dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kriteria yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi antara lain adalah waktu, biaya, mutu, partisipasi masyarakat, dan administrasi. Dari beberapa sub kriteria yang telah disajikan diantara kriteria tersebut serta dengan pilihan alternatif yang ada antara kontraktual dan pemberdayaan masyarakat, analisis kriteria yang ada, maka diketahui bobot kriteria yang menjadi pertimbangan pemilihan pelaksanaan konstruksi dengan perhitungan bobot alternatif antara kontraktual dan pemberdayaan masyarakat dari tiap-tiap kriteria yang dipertimbangkan. Dengan hasil analisis bahwa yang memilih pelaksanaan proyek konstruksi secara kontraktual ada 3 kriteria yaitu kriteria biaya, kriteria mutu, dan kriteria administrasi. Sedangkan yang memilih pelaksanaan proyek konstruksi secara pemberdayaan masyarakat ada 2 kriteria yaitu kriteria waktu dan kriteria partisipasi

5. KESIMPULAN

Opsi pemilihan jenis infrastuktur yang dapat di bangun oleh masyarakat, lebih banyak pada program dana desa dan pisew, dan paling sedikit pada program pamsimas dan sanimas. Jenis infrastruktur yang paling banyak di bangun adalah jalan, sarana air minum dan sanitasi. Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di mulai dari tahapan persiapan (penentuan lokasi, sosialisasi, rekrutmen pendamping program, pembentukan LKM dan KSM), tahap perencanaan (penyusunan dokumen RKM/proposal), tahap pelaksanaan pembangunan (pengadaan barang/jasa, perubahan dan serah terima), tahap pasca konstruksi

(operasional dan pemeliharaan). Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program, antara lain : permasalahan tingkat masyarakat, permasalahan konsultan/fasilitator pendamping, permasalahan administrasi, permasalahan pelaksanaan pembangunan (waktu, mutu, biaya).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Dian Wahyoni DF, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Tim Konsultan, Satker, Masyarakat wilayah dampingan Program Dana Desa, Program Kotaku, Program Pamsimas, Program Sanimas, dan Program Pisew. Selanjutnya kepada LPPM Unidha yang sudah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnudin A. 2010. Pendekatan partisipatif dalam pembangunan proyek infrastruktur Perdesaan di Indonesia. *Jurnal SMARTek*, Vol. 8 No. 3. : 182 - 190
- Cakrawijaya MA, Riyanto B dan Nuroji. 2014. Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wornokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB* Vol. 5 No. 2 Agustus 2014
- Chasanah, U (2013). Komparasi Proyek Konstruksi Kontraktual dengan Proyek Konstruksi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Tesis. Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro
- Cook (1994), Giarci (2001), Bartle (2003), Subejo dan Supriyanto (2004), Deliveri (2004), Chambers(2001), Nasikun(2000:27), <http://F:/Pemberdayaan/Pemberdayaan201.htm>
- Creswell, John. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ervianto, Wulfram I. 2007. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Harahap, Efni Febrina. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012.
- Hardianti S, Muhammad H dan Lutfi M. 2017. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa buntongi kecamatan ampama kota). *Jurnal Katalogis* Volume 5 Nomor 1 Januari 2017: 120-126
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Noor, M. Pemberdayaan Masyarakat. 2011. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, Juli 2011
- Pratiwi SI, Marsono BD. 2012. Evaluasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) 2008-2009 di Kabupaten Jember. *Scientific Conference Of Environmental Technology IX – 2012*. 10 Juli 2012, Surabaya, Indonesia. Hal .1-6.
- Sururi, Ahmad. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 2, Jan – April tahun 2015, halaman 1 - 25
- Vitri, Gusni. (2012). Studi Evaluasi Implementasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Berbasis Kontrak Masyarakat Studi Kasus Peoyek Paket P2KP Kab. 50 Kota. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Andalas